

SKRIPSI

**KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN
SINJAI DALAM MENYERAP ASPIRASI RAKYAT DI MASA
PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Pada Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan
Umum 2019)**



Oleh:

AIDIL REZKIAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 105651100616

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM MENYERAP ASPIRASI RAKYAT DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Pada Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan
Umum 2019)

Sebagai Salahsatu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Disusun dan Diajukan Oleh:

AIDIL REZKIAWAN

Nomor Stambuk : 105651100616

Tgl. terima	31/08/2022
Nama Supir	1 eq
Jml. Jnsng.	Smb. Alumni
Nama	
No. surat masuk	P/0024/IKM/22eq
No. klasifikasi	REZ h.

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Komunikasi Politik Anggota DPRD
Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi
Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19
(Studi Kasus Pada Dapil II DPRD Kabupaten
Sinjai Pemilihan Umum 2019)

Nama Mahasiswa : Aidil Rezkiawan

Nomor Induk Mahasiswa : 105651100616

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyetujui:

Pembimbing I

Dra. Diana Rina M, M.Si

Pembimbing II

Dr. Muhammad Yahya, M.Si

Mengetahui:

Dekan

FISIP Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Ketua Program Studi

Ilmu Komunikasi

Syukri, S.Sos., M.Si
NBM: 923568

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Penguji/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 057/FSP/A.4-II/VII/43/2022 sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I.Kom) dalam Program Studi Ilmu Komunikasi di Makassar Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022.

TIM PENILAI

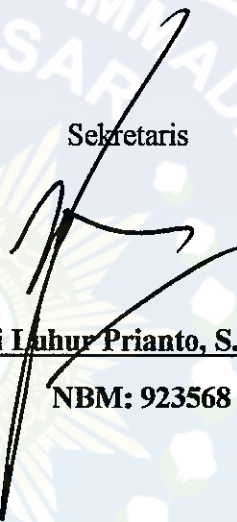
Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

Sekretaris





Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 923568

Penguji :

1. Drs. H. Muh. Tahir, M.Si
2. Syukri, S.Sos., M.Si
3. M. Amin, S.Ag., M.Pd.I
4. Dian Muhtadiah Hamna, S.IP, M.I.Kom

()
()
()
()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aidil Rezkiawan

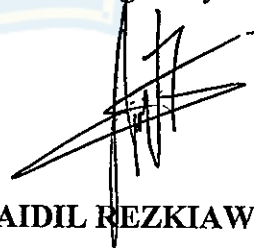
Nomor Induk Mahasiswa : 105651100616

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa Skripsi penelitian ini dengan judul : Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum 2019) adalah sepenuhnya merupakan karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 12 Mei 2022

Yang Menyatakan



AIDIL REZKIAWAN

ABSTRAK

Aidil Rezkiawan, *Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum 2019)*. (dibimbing oleh Diana Rina M dan Muhammad Yahya)

Komunikasi Politik dalam hal ini diartikan komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen adalah suatu komunikasi antara wakil rakyat (legislatif) dengan konstituennya (rakyat) dalam menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam perumusan kebijakan publik. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan jumlah informan berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat dimasa pandemic Covid-19 menunjukkan indikator (a) *Respect* (penghargaan), pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai yakni dalam melakukan komunikasi harus berdasarkan adab sopan dan santun saling menghargai dan menghormati lawan bicara baik itu masyarakat maupun pejabat terkait dengan menyerap aspirasi masyarakat pada pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Sinjai. (b) *Empathy* (empati), pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat yakni anggota DPRD Kabupaten Sinjai harus memiliki empati dalam hal ini kemampuan untuk mampu merasakan situasi yang terjadi pada proses penyerapan aspirasi oleh masyarakat, anggota DPRD harus mampu merasakan kebutuhan masyarakat sehingga empati yang ada pada diri anggota DPRD mampu mengetahui benar-benar kebutuhan masyarakat dan mampu membuat skala prioritas program demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sinjai. (c) *Audible* (dapat didengar), pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat, bahwasannya Anggota DPRD yang merupakan perwakilan seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sinjai dapat didengarkan dan dapat mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat menjadi hal yang mutlak dan anggota DPRD juga harus mampu di dengarkan oleh masyarakatnya. (d) *Clarity* (jelas) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat dapat disimpulkan bahwasannya anggota DPRD harus mampu terbuka dan menjelaskan sebagaimana yang ingin diketahui oleh masyarakat pada proses penyerapan aspirasi transparansi adalah hal utama yang dituntut oleh masyarakat sehingga anggota DPRD harus terbuka pada proses penyerapan aspirasi. (e) *Humble* (rendah hati) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat selama kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan

tindakan anggota DPRD baik itu dalam bertutur kata maupun dalam tindakan tetap saling menghargai dan tenggang rasa terhadap sesama khususnya kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengundang kekacauan pada proses penyerapan aspirasi.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Aspirasi Rakyat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
DAFTAR ISI	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Konsep dan Teori	12
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Fokus Penelitian	32
E. Deskripsi Fokus	32
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Informan	67
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....41

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....41

**B. Hasil Penelitian Penerapan Komunikasi Efektif Pada Komunikasi Politik
Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Di
Masa Pandemi Covid - 1951**

**C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Komunikasi Politik
Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat
Dimasa Pandemi Covid-19.....68**

BAB V. PENUTUP73

A. Simpulan.....73

B. Saran74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum 2019)”**, sebagai salahsatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Muhammad Yahya., M.Si dan Ibu Dra. Diana Rina., M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku penasehat akademik yang telah membantu penulis mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh staf pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kedua orang tua penulis, Agus Salim dan Helfidar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang dibanggakan.
7. Adik penulis tercinta, Ainun Anugrawati, terimakasih atas doa dan segala dukungannya.
8. Kedua kakek dan nenek penulis tercinta, H. Rivai dan Hj. Rosmyrn S yang telah merawat, mendidik dan membesarkan penulis sejak kecil.
9. Kedua wali penulis, Arifin dan Hernita yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Kota Makassar.
10. Sahabat-sahabat penulis, Fathul, Ogi, Syaharullah, Rocky, Ikram, Palli, Tomy, Fi'i, Yudi, Fandy, Arjul, Ray, Tyka, Iyang, Innah, Devi, Fauziah, Hikmah, Haerah, Wahidah, Leni, Wiwit, Fira. Terima kasih atas

kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis.

11. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas SOSPOL UNISMUH Makassar angkatan FEDERASI 2016 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
12. Seluruh keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, serta teman-teman penulis di Desa Pattalassang. Terimakasih telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
13. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan meyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Makassar, 12 Mei 2022

Penulis,

AIDIL REZKIAWAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Pada proses transisi Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi di bidang ketatanegaraan yang dijalankan melalui perubahan konstitusi Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah dikenal dengan adanya perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota perangkat daerahnya terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi dalam pemerintahan anggota dewan mempunyai beban tanggungjawab terhadap masyarakat atau daerah konstituennya di daerah pemilihannya didalam, baik itu tanggungjawab politik dan tanggungjawab moral terhadap masyarakat di daerah pemilihannya. Anggota dewan

mempunyai kewajiban bertemu dengan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dalam rangka meyerap aspirasi.

Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek bidang kehidupan manusia salahsatunya dibidang politik. Melalui komunikasi politik rakyat memberikan partisipasi politik melalui dukungan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik.

Maka dari itu sebagai wakil rakyat, anggota dewan diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan memiliki pengalaman serta pengetahuan tentang komunikasi politik yang baik sehingga mampu memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen.

Dalam proses politik, komunikasi politik merupakan hal penting sebagai jembatan menyampaikan pesan atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat kemudian diperjuangkan menjadi kebijakan yang dibutuhkan dimasyarakat.

Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 dijelaskan :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*walyakhshya ladziina law tarakuu min khalfihim dzurriyyatan dhi'aafan
khaafuu 'alayhim falyattaquu laaha walyaquuluu qawlan sadiidaa*

Artinya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa' : 9)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Islam memegang teguh prinsip keadilan. Prinsip ini salahsatunya ditegakkan dalam memelihara anak yatim. Sesama manusia diperintah untuk tidak meninggalkan anak yatim sebagai generasi penerus dalam keadaan lemah baik fisik maupun mental. Dan pada penjelasan ayat diatas, umat islam juga diperintah untuk senantiasa berkata yang baik dan benar serta membiasakan berakhlak mulia.

Anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai merupakan wakil rakyat yang telah dipilih oleh masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Daerah pemilihan tersebut dibagi berdasarkan lingkup wilayah dan cakupan luas yang telah ditetapkan. Daerah pemilihan atau dapil biasanya dibagi menjadi beberapa kecamatan.

Guna mewadahi aspirasi masyarakat diparlemen, DPRD Kabupaten Sinjai dibagi menjadi 4 Daerah Pemilihan atau disingkat dengan Dapil yakni Dapil 1 meliputi Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupuddo, Kecamatan Pulau Sembilan dengan jumlah kursi anggota dewan sebanyak 9 Kursi, Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Sinjai Timur dan Tellulimpoe dengan jumlah kursi anggota dewan sebanyak 8 Kursi, Dapil 3 meliputi Kecamatan Sinjai

Selatan dan Kecamatan Sinjai Borong dengan jumlah kursi anggota dewan sebanyak 7 kursi, serta Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Barat berjumlah 6 kursi anggota dewan.

Anggota dewan yang terpilih, asumsinya mereka wajib menjalin komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Anggota dewan dalam menyerap aspirasi dengan beberapa cara yaitu, anggota dewan menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat secara langsung pada saat rapat paripurna, ataupun dengan kunjungan langsung anggota dewan ke lapangan dalam rangka penyerapan aspirasi.

Pada tahun 2019 Indonesia dilanda pandemi yang diakibatkan wabah penyakit menular dari virus corona (*Covid-19*). Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang di keluarkan dan kemudian menjadi kebijakan tentang pembatasan kegiatan masyarakat sampai pada hari ini masih terus diberlakukan. Adanya pembatasan ini, hampir semua sektor menjadi tidak berjalan maksimal dan bahkan lumpuh total.

Penyerapan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat atau dari konstituen serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan pada masa status keadaan tertentu seperti ditengah darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, sehingga pada pelaksanaan penyerapan aspirasi khususnya pada penyerapan aspirasi harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai penanganan *corona virus disease 2019*.

Dikutip dari laman website resmi DPRD Kabupaten Sinjai <http://dprd.sinjaikab.go.id>, Janwar mengungkapkan bahwa, Berbeda dengan reses sebelumnya, dengan menggunakan banyak orang disatu tempat, menyiapkan kursi, tenda, hingga sound sistem dihilangkan pada masa reses kali ini. Berbeda dengan reses kali ini ditengah pandemi covid-19, yaitu dilakukan dengan *door to door*. Kemudian bisa dilakukan dengan bertemu langsung kepada beberapa orang ditempat tertentu atau rumah tapi tidak disiapkan tenda sehingga maksimal orang yang hadir 5-10 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kurangnya komunikasi politik antar anggota dewan dan elit politik dengan masyarakat akan menghambat tujuan politik itu sendiri serta tujuan bersama tidak akan dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Ranti Aviani Putri (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa anggota DPRD dalam penyampaian pesan-pesan politik untuk mencapai fungsi dan tujuan komunikasi politik itu sendiri disampaikan melalui tiga cara yaitu, *one-to-one*, *public meetings*, dan melalui media. Walaupun ketiga cara itu sudah efektif dalam mendukung komunikasi politik anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya, masih terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan oleh anggota DPRD tersebut seperti waktu dan dana. Anggota DPRD Kota Bandung melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dengan beberapa cara tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan komunikasi politik tersebut.

Sementara itu menurut Herwin (2016) dalam penelitiannya mengatakan ada dua bentuk komunikasi yang digunakan anggota DPRD Kabupaten

Pinrang dengan konstituennya di Kecamatan Patampanua yakni Komunikasi Interpersonal dan Komunikasi Organisasi. Meskipun telah menggunakan dua bentuk komunikasi dan ada faktor pendukung tetapi masih ada faktor yang mampu menghambat komunikasi yang dilakukan anggota DPRD seperti kedua belah pihak yang memiliki kesibukan masing-masing dan dari peraturan kunjungan yang dilaksanakan anggota DPRD sebanyak tiga kali dalam satu tahun masih terbilang kurang sehingga komunikasi yang dilakukan tidak maksimal.

Ditengah bencana pandemi Covid-19 yang membatasi kita dalam bertemu langsung dengan orang banyak atau dalam hal ini anggota dewan dengan konstituen di daerah pemilihannya. Adapun permasalahan yang terjadi pada proses penyerapan aspirasi adalah kurangnya komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat sehingga mengganggu proses politik serta mengganggu proses pemerintahan di Kabupaten Sinjai. Oleh sebab itu peneliti hendak melakukan pengkajian dan penelitian agar optimalisasi proses komunikasi masyarakat dan wakil rakyat ditengah pandemi Covid-19 masih tetap berjalan walaupun dengan keterbatasannya dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian studi kasus diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum 2019)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Sinjai pemilihan umum 2019)?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Sinjai pemilihan umum 2019)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Sinjai pemilihan umum 2019).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum 2019).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Manfaat bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat membuat peneliti lebih memahami bagaimana komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Sinjai pemilihan umum 2019).
- b) Manfaat bagi Universitas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan literature tentang komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Sinjai pemilihan umum 2019), bagi universitas, khususnya bidang studi Komunikasi Politik.
- c) Manfaat bagi sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, penelitian ini bagi instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang bagaimana komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Sinjai pemilihan umum 2019).
- d) Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi dibidang politik, terutama mengenai komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Sinjai pemilihan umum 2019).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk memperkaya bahan kajian, peneliti mengambil beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaan Penelitian
1.	Eka Sujana, (2017). Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang)	Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris.	Sebelum masa kegiatan reses dilaksanakan Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah, serta koordinasi mengenai waktu dan tempat kegiatan reses. Lalu saat masa reses dilaksanakan dengan acara sambutan, pemberian materi, dan forum diskusi oleh anggota dewan dan kontituen. Setelah masa reses selesai, masing-masing anggota dewan membuat laporan reses dan di kumpulkan pada masing-masing fraksi, pelaporan hasil kegiatan reses pada saat sidang paripurna, dan evaluasi kegiatan reses antara anggota DPRD dan pengurus partai. Faktor Penghambat kegiatan reses yaitu, waktu reses yang terbatas, minimnya partisipasi konstituen, rendahnya motivasi, lemahnya follow up, sanksi reses yang kurang tegas. Kemudian faktor pendukungnya dari dana reses, dan pengaruh latar belakang

			<p>partai.</p> <p>Adapun perbedaan dari penelitian yang akan saya laksanakan yakni dari sisi komunikasi politik anggota dewan pada masa pandemi covid-19.</p>
2.	<p>Lutfi Almutahar (2016), Universitas Tanjungpura Pontianak. Pola Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Tahun 2013 Di Kecamatan Pontianak Timur.</p>	<p>Untuk dapat mengungkapkan secara faktual dan akurat objek penelitian digunakan metode deskriptif.</p>	<p>Dalam analisis mendalam fenomena sosial yang ada anggota DPRD disini sebagai komunikator misalnya proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan dan akhirnya diterima. Upaya yang dilakukan Anggota DPRD dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjalin aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi, maupun menemukan skalaprioritas kegiatan pembangunan kdcpcan, anggota DPRD Kecamatan Pontianak Timur mengadakan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses dirasakan singkat, jadwal kegiatan anggota DPRD reses biasanya berbenturan dengan acara-acara yang mendadak yang harus dihadiri sehingga waktu reses terganggu, Kemudian masalah dana yang terbatas, karena dalam kunjungan reses kelapangan memang sudah</p>

			<p>dibatasi dalam perencanaan anggaran sehingga tidak menutup kemungkinan waktu untuk reses kelapangan kurang.</p> <p>Perbedaan dari penelitian yang akan saya laksanakan yakni dari sisi bentuk komunikasi politik anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat pada masa pandemi covid-19.</p>
3.	<p>Herwin (2016),Universitas Muhammadiyah Makassar. Komunikasi Antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Dengan Konstituennya Pada Daerah Pemilihan Di Kecamatan Patampanua Periode 2014-2015.</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitan yang bersifat deskriptif.</p>	<p>Anggota dewan dalam melakukan komunikasi dengan konstituennya menggunakan bentuk komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan komunikasi politik dengan konstituennya yakni antusiasme masyarakat dalam mengikuti penyerapan aspirasi yng dilakukan anggota dewan. Dan faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kedua belah pihak memiliki kesibukan masing-masing dan dari peraturan kunjungan yang dttapkan oleh undang-undang sebanyak tiga kali masih terbilang kurang sehingga dalam pelaksanaannya komunikasi politik tidak berjalan dengan maksimal.</p> <p>Perbedaan dari penelitian yang akan saya laksanakan yakni dari sisi bentuk komunikasi politik anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat pada masa pandemi covid-19.</p>

Sumber : Diolah dan dikembangkan oleh peneliti (2021)

B. KONSEP DAN TEORI

1. TINJAUAN KOMUNIKASI

a. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah salahsatu aktivitas manusia yang dikenali oleh semua orang namun sangat sedikit yang mampu mendefenisikan secara memuaskan. Komunikasi memiliki variasi definisi yang tidak terhingga seperti; saling berbicara satu sama lain, televisi, penyebaran informasi, gaya rambut kita, kritik sastra, dan masih banyak lagi.

Menurut Arni Muhammad dalam Pureklolon (2016:232) komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku.

Pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan politik sudah disadari oleh para cendekiawan sejak Aristoteles yang hidup ratusan tahun sebelum masehi. Akan tetapi, studi Aristoteles hanya berkisar pada retorika dalam lingkungan kecil. Baru pada pertengahan abad ke-20 ketika dunia dirasakan semakin kecil akibat revolusi industri dan revolusi teknologi elektronik setelah ditemukan kapal api, pesawat terbang, listrik, telepon, surat kabar, film, radio, televisi dan sebagainya maka cendekiawan pada abad sekarang menyadari pentingnya komunikasi ditingkatkan dari pengetahuan (*knowledge*) menjadi ilmu (*science*).

Menurut Lasswell dalam Nurudin (2017:37), komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan; Siapa? Mengatakan apa?

Dengan saluran apa? Kepada siapa? Efeknya apa? (*Who? Says what? In which channel? To Whom? With what effect?*)

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bias merupakan gagasan, informasi, opini dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.

Menurut Bernar Berelson dan Gery A. Steiner dalam Mulyana (2013:68), mendefenisikan komunikasi sebagai transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol – kata-kata, gambar, figure, grafik dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasa disebut komunikasi.

Menurut Thomas M. Scheihwadel dalam Mulyana (2011:9), mengemukakan bahwa berkomunikasi merupakan proses untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang sekitar, dan memengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, dan berperilaku seperti yang diinginkan.

Adapun Rogers bersama D. Lawrence Kincaid (1981) dalam Cangara (2013:19), mendefenisikan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi

dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

b. Unsur-unsur Komunikasi

Setiap peristiwa komunikasi dalam tingkat apapun, apakah komunikasi antarpribadi atau komunikasi massa, akan melibatkan elemen atau unsur-unsur komunikasi. Para ahli komunikasi telah lama meneliti elemen-elemen komunikasi untuk menentukan peran dari masing-masing elemen dalam menentukan efektivitas komunikasi.

Menurut Joseph Dominick dalam Morissan (2013:17-26) ada delapan unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut:

1) Sumber (Komunikator)

Proses komunikasi dimulai atau berawal dari sumber (source) atau pengirim pesan yaitu dimana gagasan, ide atau pikiran berasal yang kemudian akan disampaikan kepada pihak lainnya yaitu penerima pesan. Sumber atau pengirim pesan sering pula disebut “Komunikator”. Sumber atau Komunikator bisa saja dari Individu, kelompok, atau bahkan organisasi.

2) *Encoding*

Encoding dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indra pihak penerima.

3) Pesan

Ketika kita berbicara maka kata-kata yang kita ucapkan adalah pesan (*messages*). Ketika kita menulis surat maka apa yang kita tuliskan diatas kertas adalah pesan. Jika anda tengah menonton TV maka program yang anda tengah saksikan adalah pesan.

4) Saluran

Saluran atau channel adalah jalan yang dilalui pesan untuk sampai kepada penerima.

5) *Decoding*

Kegiatan penerimaan pesan diawali dengan proses dekoding yang merupakan kegiatan yang berlawanan dengan proses *encoding*. *Decoding* adalah kegiatan untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan pesan-pesan fisik kedalam bentuk yang memiliki arti bagi penerima.

6) Penerima (komunikasi)

Penerima atau *Receiver* atau disebut juga audiensi adalah sasaran atau target dari pesan. Penerima sering juga disebut dengan “komunikasi”.

7) *Feedback*

Feedback adalah tanggapan atau respons dari penerima pesan yang membentuk dan mengubah pesan berikut yang akan disampaikan sumber.

8) Gangguan

Elemen terakhir dalam komunikasi adalah gangguan atau noise.

Gangguan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengintervensi proses pengiriman pesan.

c. Model Efektivitas Komunikasi

Komunikasi yang efektif menurut Littlejohn dalam Pureklolon (2016:177) bisa dibangun dengan konsep saling ketergantungan (*interdependency*) karena unsur yang paling penting dalam komunikasi bukan sekedar pada apa yang dikatakan atau ditulis, tetapi lebih kepada karakter komunikator, bagaimana ia menyampaikan pesan kepada penerima pesan atau komunikan. melalui konsep saling ketergantungan ini, diharapkan munculnya efek saling percaya, saling menghargai dan saling empati.

Selain konsep ketergantungan tadi, Ariwibowoprijaksono dan Roy Sembel dalam Pureklolon (2016:177) membangun lima hukum komunikasi yang efektif, kelima hukum ini yaitu :

1) *Respect* (Penghargaan)

Respect atau penghargaan sangat diperlukan dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada prinsipnya, semua manusia ingin dihargai dan dianggap penting.

2) *Empathy* (empati)

Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Salahsatu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain.

3) *Audible* (dapat didengar)

Audible (dapat didengar) adalah pemimpin hendaknya selalu mendengarkan umpan balik dengan baik. Pesan harus disampaikan melalui media media tau *delivery channel* hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan.

4) *Clarity* (jelas)

Clarity atau kejelasan adalah pesan tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. *Clarity* dapat berupa keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi, seorang pemimpin perlu mengembangkan sikap terbuka dan dapat menimbulkan rasa percaya terhadap penerima pesan.

5) *Humble* (rendah hati)

Humble atau rendah hati adalah sikap yang merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama, yaitu untuk membangun rasa menghargai orang lain.

2. TINJAUAN POLITIK

a. Pengertian Politik

Pemahaman orang Yunani kuno tentang “politik” boleh dikatakan amat luas. Kata yang berasal dari bahasa mereka sendiri itu diartikannya sebagai “negara-kota” (*polis*), dan Aristoteles (384-322 S.M) merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang “manusia pada dasarnya binatang politik”. Dengan itu dia menjelaskan, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.

Meski begitu Aristoteles berkesimpulan satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, suatu kerangka yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial meski sebagian (pejabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya (Rodee, dkk. 2011:2).

Politik pada hakikatnya adalah bagian dari upaya manusia dalam mempertahankan atau melangsungkan kehidupannya. Politik tidak dapat dipisahkan dari keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupan. Baik secara sederhana maupun tidak, setiap manusia senantiasa melakukan hal-hal yang bersifat politik, serta berada dalam lingkungan yang disebut sistem politik. Dalam konteks ini, bahkan pada masa lampau ketika bentuk

Negara belum dikenal, lingkungan masyarakat dipandang sebagai sistem politik.(Efriza, Jerry. 2018:2)

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa memang apa yang disebut politik tidak secara otomatis, bahkan sama sepenuhnya dengan ilmu politik. Namun, apapun pemikiran yang berkembang, ilmu politik mempelajari gejala (fenomena) yang hidup dalam masyarakat, dimana hal-hal mendasar yang terdapat didalam interaksi sosial dan kehidupan masyarakat. Gejala-gejala politik sebagai bagian gejala kemasyarakatan, adalah sama tuanya dengan kehidupan manusia didunia. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa dimana ada manusia disitu ada gejala politik.

b. Unsur-unsur Politik

1) Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang terorganisasi sehingga anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat dengan tujuan memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan politik.

2) Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa ingin memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan juga tidak berusaha menguasai

pengelolaan pemerintah secara langsung, meskipun kadang pimpinan-pimpinan atau anggotanya memenangkan kedudukan politik berdasarkan pemilu. Kelompok kepentingan tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintah. Latar belakang perlunya kelompok kepentingan adalah karena setiap individu, kelompok, organisasi dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan dalam suatu Negara. Contoh organisasi yang termasuk kelompok kepentingan tersebut adalah:

- a. Lembaga swadaya masyarakat
- b. Organisasi kemasyarakatan
- c. Organisasi sosial lainnya, seperti serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, persatuan-persatuan dokter, advokat, insinyur dan guru.

3) Kelompok Penekan

Pada dasarnya, kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Kelompok penekanan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Misalnya, mereka diikat oleh kesamaan profesi, minat, keprihatinan atas sebuah masalah, ideology, suku, agama, dan wilayah. Tujuan dibentuknya kelompok penekanan adalah mencari cara agar mereka bisa memengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sesuai dengan

kepentingan atau tuntutan masyarakat luas. Dengan kalimat lain, mereka berusaha untuk memengaruhi para wakil rakyat di parlemen, termasuk kalangan pemerintahan. Contoh kelompok penekanan adalah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

4) Media Komunikasi Politik

Media massa sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Tujuan media politik adalah khalayak mengetahui agenda politik, setelah itu menaruh simpati, dan menjatuhkan pilihannya kepada partai politik tertentu. Media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudah komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak. Komunikator atau aktivis politik akan berusaha menguasai media. Pada umumnya, komunikator atau aktivis politik yang berhasil menguasai media akan memenangkan pertarungan politik.

5) Tokoh Politik

Dalam sebuah Negara, seseorang dianggap sebagai tokoh politik apabila berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Orang-orang dalam lembaga lainnya seperti lembaga yudikatif (penegak hukum dan militer) umumnya tidak dianggap sebagai tokoh politik meskipun mereka terlibat dalam tugas

pemerintah. Dengan kata lain, tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang jelas dan sedang berlangsung.

3. TINJAUAN KOMUNIKASI POLITIK

a. Pengertian Komunikasi Politik

Manusia sebagai warga masyarakat dari suatu pemerintahan, dapat terlibat dalam sebuah kegiatan politik maupun sebagai komunikator komunikasi politik maupun sebagai komunikan/khalayak komunikasi politik. Hal itu dikarenakan kegiatan politik saat ini merupakan hal umum yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat luas atau publik. Semakin pentingnya komunikasi dalam melakukan pergerakan politik seseorang, menjadi cara atau teknik sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi hubungan, memperoleh dukungan maupun integrasi politik (Mukarrom, 2016:31).

Aktivitas komunikasi tidak dapat terpisahkan dalam aktivitas politik, seperti kampanye, propaganda, retorika politik, negosiasi, pembentukan opini public, serta publisitas politik sehingga menjadi begitu penting dalam upaya memengaruhi lingkungan politik. Komunikasi dalam politik sebagai upaya pembentukan kesepakatan.

Menurut Maswadi Rauf dalam Pureklolon (2016:3) komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang di ungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan

dengan kekuasaan politik Negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.

Menurut Mukarrom (2016 : 91) Komunikasi politik merupakan hubungan timbal balik antara politisi dengan konstituen atau seluruh warga yang bertempat tinggal di wilayah politiknya. Pesan politik digunakan demi menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi politiknya. Diskusi atau pembicara antara politisi dengan konstituen umumnya membahas permasalahan politik, termasuk pesan politik.

Komunikasi politik menurut Dahlan dalam Cangara (2011:29) ialah sesuatu bidang atau disiplin ilmu yang menela perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau pengaruh terhadap perilaku politik.

Pengertian lain komunikasi politik dikemukakan oleh Dan Nimmo dalam Junaedi (2013:25) menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah aktifitas komunikasi yang berhubungan dengan politik dengan menyajikan konsekuensi aktual dan potensial yang mengatur manusia dibawah kondisi konflik.

b. Teori Komunikasi Politik

1) Teori Empati dan Teori Homofili

Persuasif yang positif berkaitan juga dengan teori empati dan teori homofili. Teori empati yang dikembangkan oleh Berlo dan Daniel Learner, teori homofili yang di perkenalkan oleh Everett M. Rogers dan F. Shoemaker. (Nina Maulida, Dkk 2018)

Teori ini merupakan penjabaran dari paradigma interaksional. Secara sederhana, empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi orang lain. Menurut Daniel Learner, empati adalah kesanggupan seseorang melihat diri sendiri kedalam situasi orang lain dan kemudian melakukan penyesuaian. Dalam hal ini, individu harus memiliki kepribadian mobile, yaitu kepribadian yang mudah bergerak dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi orang lain.

Istilah homofili berasal dari Yunani yaitu homonios yang berarti sama. Jadi homofili berarti komunikasi dengan orang yang sama, yaitu derajat orang yang berkomunikasi memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Homofili dapat digambarkan sebagai suasana dan kondisi kepribadian dan kondisi fisik dua orang yang berinteraksi karena memiliki kebersamaan usia, bahasa, pengetahuan, kepentingan, organisasi, partai, agama, suku bangsa, dan pakaian. Sulit sekali terjadi interaksi yang intensif jika dua orang yang berinteraksi bersifat heterofili, yaitu tidak memiliki kesamaan bahasa, pengetahuan dan kepentingan.

Empati dan homofili akan menciptakan semua yang akrab dan intim sehingga komunikasi politik dapat berjalan secara interaksional. Dalam hal itu interaksi yang terjadi antara dua subjek yang selevel dan sederajat. Dalam komunikasi politik yang bersifat dialogis, tidak dikembangkan aku atau kamu, melainkan yang menonjol adalah kita.

c. Bentuk-bentuk Komunikasi Politik

Secara sederhana, komunikasi politik dalam hal ini adalah interaksi yang dilakukan anggota dewan perwakilan rakyat terhadap konstituennya di daerah pemilihannya. Komunikasi politik menurut Lord Windlesham dalam Henry & Rachmah (2012:19-20) adalah pengalihan yang disengaja untuk membuat penerima berperilaku dengan cara yang mungkin tidak dilakukan dengan bijaksana.

Adapun bentuk-bentuk komunikasi politik menurut Nimmo dalam Pureklolon (2016:235) dibagi atas tujuh bentuk yaitu sebagai berikut :

1) Retorika Politik

Retorika berarti ilmu berbicara atau seni berbicara yang digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling memengaruhi. Aristoteles menyebutkan bahwa retorika merupakan seni persuasi dengan uraian yang singkat, jelas, dan dapat meyakinkan dengan menggunakan keindahan bahasa.

Selain itu, Aristoteles juga memaparkan tujuan dari retorika adalah membenarkan, memerintah, mendorong, dan mempertahankan suatu hal demi kebaikan masyarakat luas.

2) Agitasi Politik

Agitasi politik adalah upaya untuk menggerakkan massa melalui tulisan maupun lisan untuk membangkitkan emosi masyarakat luas. Dengan cara agitasi, komunikator menggerakkan massa dengan cara membuat kontradiksi didalam masyarakat untuk menentang

kenyataan hidup yang dialami selama ini sehingga menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Setelah itu masyarakat digerakkan untuk mendukung gagasan baru agar tercipta keadaan baru.

3) Propaganda

Propaganda merupakan salahsatu komunikasi yang berkaitan erat dengan persuasi. Persuasi merupakan suatu upaya untuk menyampaikan informasi/pesan denga cara tertentu membuat seseorang menjadi terpengaruh dengan informasi/pesan yang diberikan. Didalam komunikasi politik, biasanya politikus atau kader partai politik memiliki kemampuan untuk memberikan sugesti kepada masyarakat.

4) *Public Relations* Politik

Public Relations adalah kegiatan yang dilakukan pada seluruh jenis organisasi termasuk pemerintah. *Public Relations* yang dimaksudkan adalah untuk mencapai tujuan tertentu.

5) Kampanye Politik

Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari masyarakat atau seluruh pemilih.

6) Lobi Politik

Didalam dunia politik, lobi adalah upaya pendekatan dan persuasi yang dilakukan suatu pihak untuk memperoleh dukungan dari pihak lain

yang dianggap mempunyai pengaruh maupun wewenang dalam tujuan yang akan dicapai.

7) Lewat Media Massa

Media massa sebagai media pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuatan otoritas, serta membentuk opini publik yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.

Dalam melakukan komunikasi politik, anggota dewan daerah pemilihan 2 DPRD Kabupaten Sinjai menggunakan salahsatu bentuk komunikasi politik yakni Retorika Politik yang akan diteliti oleh penulis.

4. TINJAUAN ASPIRASI

a. Pengertian Aspirasi

Aspirasi menurut Goni (2019:3) adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.

Amiruddin dalam Goni (2019:3) menjelaskan konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Ditingkat ide, konsep berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Ditingkat peran dalam struktur adalah ketertiban langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah.

Menurut Bank Dunia dalam Goni (2019:3) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Aspirasi masyarakat adalah komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa ketertiban langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada tahap pengawasan telah diatur dalam undang-undang. Undang-undang No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Serta kewajiban anggota DPRD dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurut Sirajuddin, dkk dalam Goni (2019:3-4) mengungkapkan dalam proses penyerapan aspirasi yang tidak boleh di acuhkan adalah menentukan segmentasi masyarakat. Penentuan ini bukan untuk mendeskriminasikan salahsatu komunitas melainkan untuk mengetahui dan memastikan metode apa yang akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi. Agar tidak terlalu sulit maka dibagi dalam dia golongan yaitu segmentasi konstituen modern dan konstitusi tradisional. Konstituen modern adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup

modern yang hidup diwilayah pekotaan, sehingga cara menjangkaspirasinya pun melalui cara-cara yang sesuai dengan cara pola hidupnya. Sedangkan konstituen tradisional adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup yang tidak berhubungan dengan teknologi ataupun ketiadaan fasilitas seperti didaerah pedesaan maupun pegunungan.

b. Bentuk-bentuk Aspirasi

Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta tata tertib DPRD tidak diatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aspirasi itu sendiri. Hanya disebutkan bahwa kewajiban DPRD hanya menyerap, manampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Namun, menurut Marwati dalam Goni (2019:4) mengatakan bahwa dalam aktivitas sehari-hari atau dilihat dari berbagai aspirasi yang masuk di DPRD, dapat kita jumpai beberapa bentuk aspirasi diantaranya:

1) Aspirasi dalam Bentuk Tertulis

Aspirasi dalam bentuk tertulis yaitu aspirasi yang dituangkan dalam sebuah catatan yang ditujukan kepada ketua DPRD yang isinya tentang beberapa hal.

2) Aspirasi dalam Bentuk Lisan

Aspirasi dalam bentuk lisan yaitu aspirasi yang disampaikan secara langsung dan terbuka didepan ketua DPRD atau Dewan anggota lainnya apabila sipembawa aspirasi menginginkan jawaban secara langsung, maka hari itu pula anggota dewan secara langsung memberikan jawaban

yang dikehendaki oleh para demonstran. Biasanya aspirasi dalam bentuk lisan ini dibacakan didepan anggota dewan untuk didengar.

3) Aspirasi dalam Bentuk Perseorangan

Biasanya aspirasi dalam bentuk perseorangan berupa pernyataan yang disampaikan secara tertulis ditujukan kepada ketua DPRD.

4) Aspirasi dalam Bentuk Unjukrasa atau Demonstrasi

Aspirasi yang dituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa. Karena ada rasa simpati dan antipati terhadap sesuatu badan pemerintah dan simpati terhadap kelompok masyarakat. Unjukrasa atau demonstrasi diatur tersendiri diatur dalam Undang-undang No.9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum. Penyampaian aspirasi ini wajib melapor pada polisi setempat selambat-lambatnya dalam 3×24 Jam sebelum kegiatan dimulai.

5) Aspirasi dalam Bentuk Kunjungan Kerja

Aspirasi ini didapatkan pada saat anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah.

C. Kerangka Pikir

Efektivitas Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai
Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Dimasa Pandemi Covid-19

Faktor pendukung dan
penghambat komunikasi
politik

Teori Komunikasi politik
Empati oleh Berlo dan
Daniel Learner dan Teori
Hemofili diperkenalkan oleh
Everett M. Rogers dan F.
Shoemaker.

Komunikasi politik
anggota dewan dilakukan
dengan 2 cara yaitu :

1. Reses
2. Kunjungan Kerja

Model komunikasi Efektif
menurut Ariwibowo
Prijosaksono dan Roy
Sembel dalam Pureklolon
(2016:177) :

- 1) *Respect*
(penghargaan)
- 2) *Empathy* (empati)
- 3) *Audible*
(dapat didengar)
- 4) *Clarity* (jelas)
- 5) *Humble*
(rendah hati)

Efektivitas Komunikasi Politik dalam menyerap aspirasi
Rakyat.

D. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah efektivitas komunikasi politik yang dilakukan anggota dewan daerah pemilihan 2 DPRD Kabupaten Sinjai periode 2019-2024 dalam menyerap aspirasi masyarakat dimasa pandemi Covid-19 guna mendapatkan data-data yang akurat.

E. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahan dalam memaknai judul penelitian, maka terlebih dahulu akan dikemukakan definisi terhadap variable-variabel dalam judul sebagai berikut :

1. Komunikasi politik antara anggota dewan dengan konstituen adalah suatu komunikasi antara wakil rakyat (legislatif) dengan konstituen (rakyat) dalam menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam perumusan kebijakan publik.
2. Efektivitas komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau reaksi sehingga pesan pun berhasil tersampaikan dan menimbulkan sebuah komunikasi yang efektif.
3. Bentuk komunikasi personal adalah komunikasi yang ditujukan kepada sasaran yang tunggal. Komunikasi personal efektivitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkonsentrasi. Komunikasi personal yang dimaksud adalah komunikasi interpersonal. Bentuknya dapat berupa anjungsana, tukar pikiran antara anggota dewan dengan

konstituen di daerah pemilihannya. Merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi bisa leluasa dalam menyampaikan ide dan aspirasi-aspirasi masyarakat secara langsung.

4. Faktor pendukung adalah hal-hal yang menjadi pendukung komunikasi politik anggota DPRD dengan konstituen berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan.
5. Faktor penghambat adalah masalah yang menjadi penghambat proses komunikasi politik anggota dewan Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Sinjai dengan konstituen di daerah pemilihannya di tengah pandemi Covid-19.
6. *Respect* (Penghargaan) merupakan rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain.
7. *Empathy* (empati) merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain.
8. *Audible* (dapat didengar) adalah pemimpin hendaknya selalu mendengar umpan balik yang baik.
9. *Clarity* (jelas) dalam hal ini adalah pesan tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. *Clarity* dapat berupa keterbukaan. Dalam berkomunikasi pemimpin perlu mengembangkan sikap terbuka dan dapat menimbulkan rasa percaya terhadap penerima.

10. *Humble* (rendah hati) adalah sikap yang merupakan unsur terkait dengan hukum pertama yaitu untuk membangun rasa menghargai orang lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021, Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Sinjai.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Yusuf (2014:330) memaknai penelitian kualitatif adalah proses penemuan dan pengumpulan, analisis dan interpretasi data visual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian. Adapun tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

C. Informan

Informan penelitian menurut Moleong (2015 :163) adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Informan penelitian terdiri tiga macam adalah sebagai berikut :

1. Informan kunci, yakni mereka yang mengetahui dan mempunyai berbagai informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Informan utama, ialah yang terlibat secara langsung dalam berhubungan sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yang bisa memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam berhubungan sosial yang diteliti.

Pemilihan informan menjadi pokok data dalam penelitian ini ialah bersumber pada azas pokok yang menguasai permasalahan, mempunyai data, dan siap memberikan informasi lengkap dan akurat.

Penelitian kualitatif tidak dipermasalahkan jumlah informan tetapi bisa disangkutkan pada jelas tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari beragam peristiwa sosial yang diteliti. Dengan itu, informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, berbeda dengan penentuan sampel yang lain, penentuan sumber informasi secara purposive dilandasi tujuan dan pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencarian informasi akan diberhentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah tepat. Berikut nama-nama informan yang diwawancarai peneliti :

Tabel 2.1
Informan penelitian

No	Nama	Inisial	Keterangan
1	Ardiansyah Haris, S.Sos., M.M	AH	Anggota Dewan Fraksi Partai GERINDRA
2	Kamrianto, S.E	KRO	Anggota Dewan Fraksi Partai PAN
3	Hasnah, S.Sos	HH	Anggota Dewan Fraksi Partai PBB
4	Sirajuddin	SJD	Kepala Desa Tongke- Tongke
5	Kamaruddin	KRN	Kepala Desa Sukamaju
6	Jamaluddin	JLD	Kepala Desa Patalassang
7	Ridwan Adam	RA	Tokoh Masyarakat
8	Muhlis	MS	Tokoh Masyarakat
9	Yusri	YI	Tokoh Masyarakat

D. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Salahsatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat dikatakan komunikasi tatap muka (*Face to Face*) antara penanya/pewawancara dengan yang ditanya/ sumber informasi.

2. Observasi

Salahsatu proses yang bisa dilakukan untuk untuk mengetahui atau menyelidik tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan observasi.

3. Dokumen dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah lama. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terikat dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto. Dokumentasi tertulis dapat berupa kenangan, biografi, karya tulis, dan cerita. Disamping itu ada pula material budaya atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Pengabsahan Data

Adapun untuk menguji keabsahan datanya pada penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun, Dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dilapangan melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda,

pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data selama di lapangan berdasarkan model miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman Dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai komunikasi politik anggota DPRD terhadap konstituen di daerah pemilihannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Umum Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Berada pada posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" Lintang Selatan dan 1190 48' 30" sampai 1200 0' 0" Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa. Wilayah administratif terbagi atas 8 Kecamatan, 13 kelurahan, 55 desa, dan 259 lingkungan/dusun dengan luas wilayah 819,96 Km², atau 1,29 persen dari luas wilayah daratan Propinsi Sulawesi Selatan. Dari 8 Kecamatan itu, terdiri dari : 68 desa/Kelurahan
Desa:

- a. Di Kecamatan Sinjai Barat, 8 Desa / 1 Kelurahan ,
- b. Di Kecamatan Sinjai Borong, 7 Desa/ 1 Kelurahan
- c. Di Kecamatan Sinjai Selatan, 10 Desa/ 1 kelurahan
- d. Di Kecamatan Sinjai Timur , 12 Desa / 1 kelurahan,
- e. Di Kecamatan Sinjai Tengah,10 Desa/ 1 kelurahan
- f. Di Kecamatan Sinjai Utara, 7 kelurahan,
- g. Di Kecamatan Bulupoddo,10 Desa / kelurahan,

Di Kecamatan Tellulimpoe, 10 Desa/ 1 kelurahan, dan di Kecamatan Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan wilayah kepulauan.

Berdasarkan situasi Geografis, daerah Kabupaten Sinjai beriklim Sub Tropis. Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 milimeter dengan 120 Deep rain pertahun. Musim Hujan dimulai Februari s/d Juli dan musim panas mulai Agustus s/d Oktober serta kelembaban mulai November s/d Januari. Sinjai berada pada ketinggian antara 25 sampai 1.000 meter diatas permukaan laut. Luas daerah 8.1996 Ha, dengan 4,62 persen berada pada ketinggian 25 m diatas permukaan laut, 9,74 persen berada pada ketinggian 100 m diatas permukaan laut, 55,35 persen berada pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut, 21,18 persen berada pada ketinggian 500 – 1000 m dari permukaan laut dan 21,18 persen berada pada ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut.

Secara morfologi, kondisi topografi wilayah kabupaten sangat bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan 0 - 15 persen. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40 persen, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau 31,25 persen.

Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (dpl), wilayah kabupaten terbagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi ketinggian , dengan luasan sebagai berikut :

- Area dengan ketinggian 0 - 25 meter dpl , seluas 3.788 ha

- Area dengan ketinggian 25 - 100 meter dpl, seluas 7.983 ha
- Area dengan ketinggian 100 - 500 meter dpl, seluas 45.535 ha
- Area dengan ketinggian 500 - 1000 meter dpl, seluas 17.368 ha
- Area dengan ketinggian > 1000 meter dpl, seluas 6.569 ha

Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai, pada tahun 2009 sebesar 236.234 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,59 persen, yang terdiri dari 114.867 jiwa penduduk laki-laki dan 121.367 jiwa penduduk perempuan. Sex ratio sebesar 92 persen artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai sebesar 265 jiwa per km² dengan Kecamatan Sinjai utara merupakan daerah yang memiliki kepadatan terbesar yaitu 1.279 per km² dan Kecamatan Sinjai Barat dengan kepadatan terendah yakni 167 km².

a. Visi Misi Kabupaten Sinjai

Visi

"Sinjai Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"

Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
- 3) Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sehat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

- 5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat berbasis kerakyatan yang berwawasan lingkungan.
- 6) Meningkatkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
- 7) Menegakkan Supremasi Hukum.

2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sinjai

a. Sejarah DPRD Kabupaten Sinjai

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai legislator yang mengembangkan amanah dari masyarakat dalam mengontrol dan memberikan koreksi serta masukan terhadap usulan dari para eksekutif baik berupa Perda maupun prodak-prodak hukum lainnya.

Selain daripada tersebut diatas juga dapat melahirkan rancangan perda inisiatif kondisi Legislatif pada saat ini sudah mengalami banyak perubahan dimulai sejak tumbanganya Orde Baru, mengingat sebelumnya usulan-usulan yang diajukan oleh pihak Eksekutif hampir tidak ada yang mengalami perubahan, hingga titik koma. Mengingat hal tersebut, maka keberadaan Legislatif sangat dibutuhkan perannya dalam forum-forum resmi termasuk didalamnya rapat-rapat paripurna, rapat komisi maupun rapat-rapat fraksi. Disamping itu posisi legislatif yang terbatas pada pengawasan dan kebijakan publik saja, mengingat keterbatasan pada hal-hal teknis.

Kedudukan eksekutif sebagai mitra harus siap dikontrol mendapat koreksi dari legislatif, namun bukan berarti membatasi ruang gerak tetapi

tetap sama-sama berjalan dalam koridor dan aturan yang sudah ada. Selaku mitra juga harus senantiasa mengacu pada visi dan misi daerah, dengan mengacu pada kepentingan rakyat. Kedepan sosok wakil rakyat ideal tentulah sangat diharapkan sebagai kepribadian anggota DPRD yang terpilih.

Sejak terbentuknya DPRD Kabupaten Sinjai hingga saat ini sudah yang ke-9 (sembilan) kali/periode. Periode Pertama pada tahun 1961 – 1971 pada saat itu masih DPRGR dan dipimpin oleh A. Marsuki Amal kemudian dilanjutkan pada periode tahun 1971 – 1977, DPRD Sinjai dipimpin oleh Muh. Tabiala dan kembali dilanjutkan oleh A.Pattikkeng dan Drs. A.Muh.Saleh Asapa pada tahun 1977 – 1982. Pada periode ke empat tahun 1982 – 1987 oleh A.Patarai dan Muh.Tabiala, dan kembali dilanjutkan pada tahun 1987 – 1992 oleh Muh.Tabiala dan A. Patarai.

Pada tahun 1992 – 1997 DPRD Kab.Sinjai di pimpin oleh H.Arifuddin Mustafa dan H.M.Yunus Paola kemudian pada tahun 1997 – 1999 dilanjutkan oleh Abd. Rachman dengan wakil Solihin dan pada tahun 1999 – 2004 dipimpin oleh H.A.Razak Alty, BA, Solihin dan Drs.M.Yusuf Achmad sebagai Ketua dan wakil ketua, kemudian periode 2004 – 2009 dilanjutkan oleh H.Amru Rijal Junaid, Drs.H.Mappirewa Kasim dan H.A.Razak Alty, BA sebagai Ketua dan Wakil Ketuadengan tiga Komisi dan dua Fraksi yakni Fraksi Golkar dan Fraksi Sinjai Bersatu.

Pada periode 2009-2014 dipimpin oleh H.Sultani,SH.MH, dan sebagai wakil ketua satu DPRD Ir.Hj.Kartini dan sebagaia wakil Ketua II

Drs.A.Muhtar Mappatoba,Mpd. terdiri dari tiga komisi dan tujuh fraksi yaitu antarlain: Fraksi Republikan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Kebangkitan Nurani Rakyat, Fraksi Bintang Demokrasi Perjuangan Kedaulatan Rakyat.

Tahun 2014 -2019 dipimpin oleh ABD. Haris Umar dan sebagai wakil ketua satu Ir.Hj A.Kartini,Sp.M.sp dan wakil ketua dua Jamaluddin, SH. Terdiri dari tiga komisi dan delapan fraksi yaitu antara lain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Amanat Sejahtera(PAN + PKS), Fraksi Restorasi Bintang Perjuangan(NASDEM + PBB +PDI-P) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

b. DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum 2019

Dalam rangka mewedahi aspirasi masyarakat diparlemen, DPRD Kabupaten Sinjai periode 2019 - 2024 adapun data DPRD Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

Ketua : Jamaluddin, S.H

Wakil Ketua I : Sabir

Wakil Ketua II : Mappahakkang, S.Ag

DPRD Kabupaten Sinjai dibagi menjadi 4 Daerah Pemilihan dari keseluruhan 9 Kecamatan. Berikut ini data tentang hasil penetapan anggota DPRD Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum 2019.

Tabel 4.1
*Daftar Daerah Pemilihan, dan Jumlah Anggota
 DPRD Kabupaten Sinjai 2019-2024*

NO	NAMA DAPIL	CAKUPAN KECAMATAN	JUMLAH KURSI
1	DAPIL 1	Sinjai Utara, Bulupoddo, Pulau Sembilan.	9 Kursi
2	DAPIL 2	Sinjai Timur, Tellulimpoe.	8 Kursi
3	DAPIL 3	Sinjai Selatan, Sinjai Borong.	7 Kursi
4	DAPIL 4	Sinjai Tengah, Sinjai Barat.	6 Kursi
JUMLAH			30 Kursi

(Sumber: <http://dprd.sinjaikab.go.id> Diolah oleh penulis dari
 Laman website DPRD Kabupaten Sinjai, 2021)

Kabupaten Sinjai memiliki kecamatan dengan jumlah 9 Kecamatan yang dibagi menjadi 4 Daerah pemilihan yang menghasilkan 30 anggota DPRD terpilih pada periode 2019-2024. DPRD Kabupaten Sinjai periode 2019-2024 memiliki 11 partai yaitu PDIP, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, PPP, PKB, PKS dan PBB yang dimana di bagi menjadi 9 fraksi.

Tabel 4.1
*Daftar Partai, Fraksi, dan Jumlah Anggota
 DPRD Kabupaten Sinjai 2019-2024*

FRAKSI	PARTAI	JUMLAH ANGGOTA
Fraksi Partai Gerindra	GERINDRA	5
Fraksi Partai Golkar	GOLKAR	4
Fraksi PAN	PAN	3
Fraksi PPP	PPP	3
Fraksi Partai Demokrat	DEMOKRAT	3
Fraksi PKS	PKS	3
Fraksi Nurani Berjuang	IIANURA, PDIP	3
Fraksi Restorasi Indonesia	NASDEM	3
Fraksi Bintang Kebangsaan	PKB, PBB	3
JUMLAH		30

(Sumber: <http://dprd.sinjaikab.go.id> Diolah oleh penulis dari

Laman website DPRD Kabupaten Sinjai, 2021)

c. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Sinjai

Visi sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai adalah Terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang transparan dan akuntabel dalam menunjang kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

Dalam mewujudkan Visi DPRD Kabupaten Sinjai, sekretariat menyusun beberapa misi yakni :

- 1) Meningkatkan kapasitas/kemampuan sumber daya aparatur sekretariat DPRD.

- 2) Mengembangkan sarana penunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD.
- 3) Mendukung peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara daerah.

d. Kedudukan DPRD Kabupaten Sinjai

Adapun kedudukan DPRD Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

- 1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama-sama Pemerintah Daerah.
- 2) DPRD berkedudukan setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan sejajar dengan Pemerintah Daerah.
- 3) Anggota DPRD adalah pejabat daerah kabupaten.

e. Fungsi DPRD Kabupaten Sinjai

Adapun fungsi DPRD Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan PERDA
- 2) Anggaran
- 3) Pengawasan

f. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Sinjai

Adapun tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- 1) Membentuk Perda bersama Bupati.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 4) Memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati atau wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

g. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sinjai

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- 1) Pimpinan DPRD;

- 2) Badan Musyawarah;
- 3) Komisi;
- 4) Bapemperda;
- 5) Badan Anggaran;
- 6) Badan Kehormatan; dan
- 7) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

B. Hasil Penelitian Penerapan Komunikasi Efektif Pada Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19.

Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dapil II yang meliputi Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpoe sangat berperan sebagai komunikator dalam menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat, dalam hal ini anggota dewan dimasa pandemi Covid-19 melaksanakan komunikasi politiknya secara langsung atau tatap muka, salahsatu tantangan anggota DPRD disini dalam proses penyerapan aspirasi haruslah benar-benar melakukan komunikasi politiknya secara efektif sehingga mampu memainkan perannya sebagai peyalur aspirasi dan menjalankan dengan baik fungsi kontrol, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Adapun hukum komunikasi efektif yang di jelaskan menurut Ariwibowo Prijosaksono dan Roy Sembel dalam Pureklolon (2016:177) :

1) *Respect* (penghargaan)

Respect atau penghargaan dalam hal ini adalah rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Beberapa Kepala Desa dan Masyarakat.

a. Berdasarkan indikator *Respect* (Penghargaan) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai bentuk penghargaan anggota DPRD dalam melakukan komunikasi terhadap lawan bicara/ audiens yang hendak akan melakukan komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Ardiansyah Haris selaku anggota DPRD Kab. Sinjai fraksi Gerindra mengatakan :

“...untuk berkomunikasi tentu kita harus saling menghargai berkomunikasi dengan sepenuh hati misalnya kita ini mendengarkan pembicaraan tidak sambil main hp, atau hanya sekedar mendengar istilahnya tidak ikhlas berbicara maupun mendengarkan orang lain..” (Wawancara Ardiansyah Haris di Kabupaten Sinjai, 24 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya dalam melakukan komunikasi harus berdasarkan penghargaan satu sama lain dengan berkomunikasi dengan tulus dan sepenuh hati tidak melakukan gerakan yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak baik.

Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Kamrianto selaku anggota dewan fraksi PAN yang mengatakan:

“...di dalam berkomunikasi kan kita ada adab yang harus kita jaga, selama kita menyesuaikan adab yang kita miliki dengan berkomunikasi dengan jujur, melihat orang yang berbicara dengan kita kan itu sebuah bentuk penghargaan. Alangkah tidak baiknya kalau kita lagi berbicara kemudian tidak saling berhadapan dan tidak bertatap wajah kemudian juga didalam komunikasi di usahakan tidak menimbulkan ketersinggungan pihak-pihak yang ditemani berkomunikasi saya kira itu dek...” (Wawancara Kamrianto di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Wawancara diatas menyatakan untuk menjaga dan menghargai dalam berkomunikasi hendaknya menjaga adab dalam bertutur dengan tidak menimbulkan miskomunikasi terhadap lawan bicara dan berbicara dengan *face to face*. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Sirajuddin selaku Kepala Desa Tongke-Tongke yang mengatakan :

“...menghargai dalam berkomunikasi saling mendengarkan pembicaraan, berkata dengan sopan dan baik untuk di dengar sehingga komunikasi yang dihasilkan tentu baik dan bermanfaat...” (Wawancara Sirajuddin di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Sedangkan wawancara diatas menyatakan bahwasannya dalam komunikasi penghargaan/ *respect* dengan cara bertutur yang baik dan beretika, mendengarkan pembicaraan satu sama lain dengan baik sehingga komunikasi berjalan dengan baik dan lancar, kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat yakni Ridwan Adam mengatakan bahwa:

“...respect dalam berkomunikasi hal yang sangat penting contoh kecil saja kalau kita berbicara dengan orang lain kita harus memiliki pembawaan yang tenang, baik berbicara dengan sopan apa lagi dalam menghadapi orang banyak dan mendengarkan

aspirasi masyarakat, agar masyarakat merasa bahwasannya aspirasi masyarakat ini didengar...” (Wawancara Ridwan Adam di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Wawancara diatas menyatakan bahwasanya pada kegiatan penyerapan aspirasi selayaknya saling menghargai satu sama lain dalam berkomunikasi agar aspirasi masyarakat terserap dengan baik dan mampu dilaksanakan, sehingga menghargai didalam berkomunikasi dengan cara berbicara dengan baik dan sopan merupakan hal yang utama dalam berkomunikasi.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara mengenai bentuk penghargaan anggota DPRD dalam melakukan komunikasi terhadap *audience* yang hendak akan melakukan komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat yakni dengan berkomunikasi dengan sopan dan beradab sesuai dengan kebiasaan dan adab lingkungan sekitar, serta berkata jujur dan baik dalam melakukan komunikasi.

Berdasarkan indikator *Respect* (Penghargaan) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai rasa hormat anggota DPRD dalam melakukan komunikasi kepada audiens yang hendak akan menyerap aspirasi masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Ardiansyah Haris selaku anggota DPRD Kab. Sinjai fraksi Gerindra mengatakan :

“...sebagai anggota dewan yang dipilih oleh rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat tentu harus saling menghormati dan menerima segala kritikan dan saran yang diberikan masyarakat...”

(Wawancara Ardiansyah Haris di Kabupaten Sinjai, 24 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya rasa hormat harus tetap dijaga dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat khususnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Hasnah selaku anggota dewan fraksi PBB yang mengatakan:

“...rasa hormat harus tetap ditunjukkan dalam melakukan komunikasi, apalagi kita berada di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma kesopanan sehingga saling menghormati harus ditunjukkan dalam berkomunikasi bagaimana pun bentuk komunikasi yang dilakukan, dan sebagai wakil rakyat kita harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat...” (Wawancara Hasnah di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya sebagai wakil rakyat anggota DPRD harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, berkomunikasi tetap menjunjung rasa hormat baik itu kepada siapapun merupakan hal yang utama. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Jamaluddin selaku Kepala Desa Patalassang yang mengatakan :

“...kalau kita berkomunikasi tentu harus saling menghormati apa lagi kalau didalam sebuah forum, menyerap aspirasi masyarakat kan ada forum resmi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat antara anggota dewan, camat, kepala desa dan masyarakat semua harus saling menghormati satu sama lain...” (Wawancara Jamaluddin di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang terlibat di dalam harus menjaga perilaku dan saling menghormati dalam berinteraksi dan

berkomunikasi. Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat yakni Yusri mengatakan bahwa:

“...tentu harus saling menghormati, misalnya berbicara seperlunya sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga tetap menjaga tingkah laku karena pada saat mengeluarkan aspirasi terkadang ada hal-hal yang berbeda pendapat dengan orang-orang terkait...” (Wawancara Yusri di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya pada proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD harus berlandaskan saling menghormati satu sama lain dalam menyuarakan aspirasinya terhadap kebutuhan masyarakat.

Disimpulkan terkait dengan rasa hormat anggota DPRD dalam melakukan komunikasi kepada audiens yang hendak akan menyerap aspirasi masyarakat, pada proses tersebut harus berperilaku saling menghormati baik itu dalam berkomunikasi maupun bertindak untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan saling menghormati antara anggota dewan, pejabat yang terkait dan masyarakat.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator *Respect* (Penghargaan) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai yakni dalam melakukan komunikasi harus berdasarkan adab sopan dan santun saling menghargai dan menghormati lawan bicara baik itu masyarakat maupun pejabat terkait dengan menyerap aspirasi masyarakat pada pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Sinjai.

2) *Empathy* (empati)

Empati dalam hal ini adalah kemampuan seseorang menempatkan diri dalam situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain.

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Beberapa Kepala Desa dan Masyarakat.

- a. Berdasarkan indikator *Emphaty* (empati) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai kemampuan anggota DPRD menempatkan diri terhadap situasi dan kondisi yang ada pada proses penyerapan aspirasi masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kamrianto selaku anggota DPRD Kab. Sinjai fraksi PAN mengatakan :

“...sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat anggota dewan bersangkutan seharusnya memiliki kepekaan dan kemampuan terhadap lingkungannya baik itu situasi untuk berkomunikasi maupun hal-hal yang terjadi disekitarnya...”
(Wawancara Kamrianto di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwasannya anggota DPRD harus memiliki kemampuan dan kepekaan terhadap situasi yang terjadi di lingkungan sekitarnya untuk mengetahui keadaan agar mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Hasnah selaku anggota dewan fraksi PBB yang mengatakan:

“...rasa empati dalam berkomunikasi itu harus ada apa lagi kita ini mau mendengar aspirasi masyarakat, sebagai orang yang

dipercaya untuk mewakili suara masyarakat, anggota DPRD itu harus mau merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya baik itu senangnya maupun penderitaan dan kesusahan masyarakat, empati dalam menyerap aspirasi penting agar kita paham bagaimana kondisi masyarakat kita saat ini...”
(Wawancara Hasnah di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya empati di dalam menyerap aspirasi masyarakat sangat diperlukan agar anggota dewan paham dan mampu merasakan kondisi masyarakat sehingga aspirasi yang dituangkan tidak hanya sekedar unek-unek belaka namun harus menjadi perhatian dan mampu memberikan solusi kepada masyarakat. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Kamaruddin selaku Kepala Desa Sukamaju yang mengatakan :

“...kita ini manusia memiliki hati dan nurani jadi sudah seharusnya empati itu ada didalam setiap raganya manusia, apa lagi menyangkut kemaslahatan masyarakat. Aspirasi-aspirasi yang dikeluarkan masyarakat ini harus benar-benar diserap dengan baik dan dibuatkan skala prioritas oleh anggota DPRD mereka harus mengetahui keadaan masyarakatnya dengan berbagai kebutuhan dan bantuan yang harus direalisasikan oleh sebab itu pada penyerapan aspirasi masyarakat yang biasa dilakukan pada reses-reses anggota dewan harus mampu menampung semua aspirasi masyarakat..” (Wawancara Kamaruddin di Kabupaten Sinjai, 27 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa sudah seharusnya anggota DPRD memiliki empati pada proses penyerapan aspirasi masyarakat karena anggota DPRD merupakan perwakilan suara rakyat dan harus paham dan mengetahui segala kondisi masyarakat Kabupaten Sinjai. Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat yakni Muhlis mengatakan bahwa:

“...didalam menyerap aspirasi tidak hanya mendengarkan semua keluhan masyarakat tapi anggota dewan harus paham benar tentang kondisi dan situasi yang terjadi di daerah. Dari empati tersebut mereka paham yang mana menjadi prioritas utama mana yang membutuhkan eksekusi lebih cepat...” (Wawancara Muhlis di Kabupaten Sinjai, 27 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya anggota dewan harus memiliki empati dalam menyerap aspirasi masyarakat agar mampu merasakan kondisi dan situasi masyarakat dan mampu memutuskan kebutuhan masyarakat berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.

Jadi dari keseluruhan hasil wawancara pada indikator *Emphaty* (empati) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat yakni anggota DPRD Kabupaten Sinjai harus memiliki empati dalam hal ini kemampuan untuk mampu merasakan situasi yang terjadi pada proses penyerapan aspirasi oleh masyarakat, anggota DPRD harus mampu merasakan kebutuhan masyarakat sehingga empati yang ada pada diri anggota DPRD mampu mengetahui benar-benar kebutuhan masyarakat dan mampu membuat skala prioritas program demi tercapainya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sinjai.

Adapun keterkaitan antara teori empati dan hemofili pada indikator ini sangat erat kaitannya dikarenakan anggota DPRD Kabupaten Sinjai harus mampu melihat kondisi dan situasi sehingga harus mampu menyesuaikan diri dengan dengan kondisi orang lain, baik itu menyesuaikan pola bicara dan gestur tubuh untuk melakukan

komunikasi kepada masyarakat yang memiliki jenis karakter yang berbeda disetiap komunikasi yang dilakukan.

3) *Audible* (dapat didengar)

Audible atau dapat didengar dalam hal ini seorang pemimpin handaknya selalu mendengar umpan balik dengan baik. Pesan harus disampaikan melalui media hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan.

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Beberapa Kepala Desa dan Masyarakat.

- a. Berdasarkan indikator *Audible* (dapat didengar) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai kemampuan anggota DPRD mampu mendengarkan keluhan masyarakat serta masyarakat merasa didengar pada proses penyerapan aspirasi masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Ardiansyah Haris selaku anggota DPRD Kab. Sinjai fraksi Gerindra mengatakan :

“...penyerapan aspirasi masyarakat tidak hanya melalui aspirasi-aspirasi namun juga dengan agenda reses yang mana kegiatan anggota DPRD diluar kantor DPRD untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat pada daerah yang dikunjungi...” (Wawancara Ardiansyah Haris di Kabupaten Sinjai, 24 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya media yang digunakan untuk menyerap aspirasi tidak hanya melalui komunikasi langsung kepada masyarakat namun juga melalui

kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sinjai. Kemudian melakukan wawancara bersama Kamrianto selaku anggota DPRD Kab. Sinjai fraksi PAN mengatakan:

“...anggota dewan dalam menyerap aspirasi itu memang seharusnya mampu di dengar oleh masyarakatnya bisa menjelaskan mengenai hal-hal masyarakat ingin ketahui kemudian juga mampu mendengarkan aspirasi orang-orang, dan menerima segala bentuk kritikan dan saran yang diberikan dengan profesional...”
(Wawancara Kamrianto di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya anggota dewan sebagai perwakilan rakyat sudah seharusnya di dengarkan oleh masyarakatnya dan sudah menjadi kewajiban untuk mendengarkan semua keluhan dan aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Jamaluddin selaku Kepala Desa Patalassang yang mengatakan :

“...sejauh ini pada proses penyerapan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik di desa patalassang, serta terlaksana dengan tertib saling mendengarkan dan terjadi umpan balik respon antara masyarakat dan anggota dewan...” (Wawancara Jamaluddin di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pada proses penyerapan aspirasi di desa patalassang berjalan dengan baik, tertib dan umpan balik antara penerima aspirasi dan yang memberikan aspirasi berjalan dengan baik. Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat yakni Yusri mengatakan bahwa:

“...para anggota dewan yang hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat alhamdulillah mendengarkan semua keluhan kami di desa patalassang ini kita juga memberikan saran terhadap pembangunan desa kedepan apa saja yang menjadi fokus

masyarakat desa..." (Wawancara Yusri di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya anggota DPRD Kabupaten Sinjai mendengarkan dengan baik keluhan masyarakat serta aspirasi masyarakat yang harus ditindak lanjuti oleh anggota DPRD Kabupaten Sinjai.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator Audible (dapat didengar) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat, bahwasannya Anggota DPRD yang merupakan perwakilan seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sinjai dapat didengarkan dan dapat mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat menjadi hal yang mutlak dan anggota DPRD juga harus mampu didengarkan oleh masyarakatnya, serta pada proses penyerapan aspirasi indikator tersebut menjadi hal yang utama agar pelaksanaan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik.

4) *Clarity* (jelas)

Clarity (jelas) pesan tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang belainan. Dalam hal ini *Clarity* dapat berupa kejelasan atau transparansi.

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Beberapa Kepala Desa dan Masyarakat.

a. Berdasarkan indikator *Clarity* (jelas) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai transparansi yang berupa kejelasan anggota DPRD terhadap masyarakat pada proses penyerapan aspirasi masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kamrianto selaku anggota DPRD Kab. Sinjai fraksi PAN mengatakan :

“...tentu transparansi itu harus dilakukan kalau masyarakat menuntut kejelasan mengenai suatu hal anggota DPRD harus mampu memberikan kejelasan terhadap apapun yang diminta oleh masyarakat...” (Wawancara Kamrianto di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Dari wawancara di atas menyatakan bahwasannya anggota DPRD harus mampu memberikan penjelasan dan transparansi terhadap pertanyaan maupun tuntutan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh anggota DPRD terhadap masyarakat Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Hasnah selaku anggota dewan fraksi PBB yang mengatakan:

“...transparasi sudah menjadi kewajiban anggota dewan, terbuka kepada masyarakat baik itu mengenai anggaran pada pembangunan, pelayanan apapun itu anggota dewan sudah seharusnya terbuka terhadap masyarakat karena anggota dewan dipilih oleh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat agar mampu bekerja membangun daerahnya...” (Wawancara Hasnah di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya tugas anggota DPRD adalah melaporkan kepada masyarakat mengenai kondisi daerah, berdasarkan asas keterbukaan sudah menjadi kewajiban anggota DPRD harus bersifat terbuka kepada masyarakat. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Sirajuddin selaku Kepala Desa Tongke-Tongke yang mengatakan :

“...sejauh ini terkait dengan transparansinya pertanyaan masyarakat mereka jawab dengan lugas, kemudian juga mereka memberikan penjelasan terkait program yang harus didahulukan dan ditunda terkait keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah...” (Wawancara Sirajuddin di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya anggota DPRD telah memberikan keterangan terkait dengan aspirasi masyarakat yang hendak dilaksanakan maupun belum bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan finansial oleh pemerintah daerah. Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat yakni Ridwan Adam mengatakan bahwa:

“...kalau untuk saya sendiri transparansi anggota DPRD kabupaten sinjai sendiri masih belum sepenuhnya, karena masih terlihat benar-benar belum terbuka kepada masyarakat terkait dengan rancangan kedepan RAPBD tidak di paparkan seluruhnya oleh karena itu keterbukaan anggota DPRD belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat...” (Wawancara Ridwan Adam di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya keterbukaan anggota DPRD kabupaten Sinjai belum sepenuhnya terbuka dikarenakan anggota DPRD tidak terlihat terbuka sepenuhnya terkait

dengan rancangan penggunaan anggaran daerah tidak dipaparkan semuanya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator *Clarity* (jelas) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat dapat disimpulkan bahwasannya anggota DPRD harus mampu terbuka dan menjelaskan sebagaimana yang ingin diketahui oleh masyarakat pada proses penyerapan aspirasi transparansi adalah hal utama yang dituntut oleh masyarakat sehingga anggota DPRD harus terbuka pada proses penyerapan aspirasi, namun menurut beberapa masyarakat keterbukaan anggota DPRD belum sepenuhnya terbuka dikarenakan masyarakat merasa masih ada hal-hal yang belum dibuka sepenuhnya.

5) *Humble* (rendah hati)

Humble adalah sikap yang merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama yaitu untuk membangun rasa menghargai orang lain.

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Beberapa Kepala Desa dan Masyarakat.

- a. Berdasarkan indikator *Humble* (rendah hati) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai transparansi yang berupa kejelasan anggota DPRD terhadap

masyarakat pada proses penyerapan aspirasi masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Hasnah selaku anggota dewan fraksi PBB yang mengatakan:

“...kita sebagai manusia sudah seharusnya memiliki sifat rendah hati, jabatan yang dititipkan oleh Allah SWT melalui masyarakat tidak pantas untuk bersifat arogan kepada masyarakat...”
(Wawancara Hasnah di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan sebagai manusia yang dititipkan amanah jabatan melalui masyarakat tidak pantas kalau Anggota DPRD melakukan tindakan arogansi kepada masyarakat. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Ardiansyah Haris selaku anggota DPRD Kab. Sinjai fraksi Gerindra mengatakan :

“...sikap rendah hati harus selalu ditunjukkan kepada siapapun, saling menghargai baik itu dalam berkomunikasi kepada siapapun maupun melalui tindakan atau tutur kata...” (Wawancara Ardiansyah Haris di Kabupaten Sinjai, 24 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya di dalam setiap komunikasi maupun tindakan yang dilakukan kita harus bersikap rendah hati dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Kamaruddin selaku Kepala Desa Sukamaju yang mengatakan :

“...banyak anggota dewan yang masih memiliki jiwa yang rendah hati dan semua yang melakukan kunjungan ke daerah kami alhamdulillah semuanya baik tidak ada tindakan arogan pada proses penyerapan aspirasi disini...” (Wawancara Kamaruddin di Kabupaten Sinjai, 27 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya semua anggota dewan yang sudah melakukan penyerapan aspirasi di desa Sukamaju tidak melakukan tindakan yang mengundang arogansi masyarakat dan berjalan dengan lancer. Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat yakni Muhlis mengatakan bahwa:

“...kalau selama proses penyerapan aspirasi alhamdulillah tidak ada kekacauan atau sikap anggota DPRD yang tidak baik, walaupun ya masih banyak anggota DPRD yang masih tidak menunjukkan hal demikian tapi selama penyerapan aspirasi tidak ada...” (Wawancara Muhlis di Kabupaten Sinjai, 27 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya selama penyerapan aspirasi masyarakat tidak ada anggota DPRD yang melakukan tindakan yang tidak menghargai masyarakat.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator *Humble* (rendah hati) pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat selama kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan, tindakan anggota DPRD baik itu dalam bertutur kata maupun dalam tindakan tetap saling menghargai dan tenggang rasa terhadap sesama khususnya kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengundang kekacauan pada proses penyerapan aspirasi.

Adapun keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori hemofili yang ada bahwa komunikasi yang dibentuk harus sama dalam hal ini menyesuaikan dengan suasana, kondisi untuk berinteraksi dan menyamakan diri tidak lebih diatas dari orang yang sedang berinteraksi sehingga menciptakan suasana yang akrab dan intim sehingga komunikasi politik dapat berjalan secara interaksional.

C. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19

1. Berdasarkan faktor-faktor pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai faktor pendukung komunikasi anggota DPRD terhadap masyarakat pada proses penyerapan aspirasi masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Ardiansyah Haris selaku anggota DPRD Kab. Sinjai fraksi Gerindra mengatakan :

“...ada beberapa kesulitan namun juga ada pendukung dan memberikan kemudahan kepada kami untuk melakukan komunikasi kepada masyarat, adanya feedback langsung dari masyarakat dan pejabat desa atau kecamatan pada proses penyerapan aspirasi yang membuat komunikasi menjadi lebih baik...” (Wawancara Ardiansyah Haris di Kabupaten Sinjai, 24 November 2021)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya faktor pendorong dalam komunikasi proses penyerapan aspirasi yakni adanya feedback dikarenakan adanya respon yang cepat dari masyarakat. Kemudian

selanjutnya dilakukan wawancara bersama Kamrianto selaku anggota dewan fraksi PAN yang mengatakan:

“...faktor yang mempengaruhi komunikasi menjadi baik menurut saya cara yang terstruktur kemudian media yang digunakan juga efektif, misalnya media yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi ini melalui sebuah forum sehingga komunikasi menjadi teratur dialog-dialog juga terarah saya kira demikian...”
(Wawancara Kamrianto di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya pendorong komunikasi menjadi baik yakni penggunaan media pengantar komunikasi dengan baik sehingga komunikasi menjadi terarah. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Jamaluddin selaku Kepala Desa Patalassang yang mengatakan :

“...menurut saya faktor pendukung komunikasi yaitu tidak terlepas dari masyarakat yang menerima dan mau tertib serta teratur pada proses penyerapan aspirasi kemudian melakukan dialog bersama anggota dewan...” (Wawancara Jamaluddin di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Wawancara diatas menunjukkan bahwasannya salah satu faktor pendukung komunikasi pada proses penyerapan aspirasi masyarakat yakni adalah masyarakat mampu menerima dan melakukan dialog secara teratur dan tertib bersama anggota dewan. Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat yakni Yusri mengatakan bahwa:

“...menurut saya faktor pendukung dari proses penyerapan aspirasi dari segi masyarakat kami melihat penyerapan aspirasi ini menjadi kesempatan masyarakat dapat berkomunikasi langsung kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengeluarkan aspirasi-aspirasinya...” (Wawancara Yusri di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan aspirasinya kemudian menjelaskan kondisi daerahnya kepada anggota dewan untuk dilakukan revitalisasi maupun pembangunan berkala di daerah masing-masing.

Sehingga dapat disimpulkan dari keseluruhan wawancara pada faktor pendukung ada beberapa hal yang membuat komunikasi pada penyerapan aspirasi berjalan dengan baik yakni adanya respon masyarakat terhadap penyerapan aspirasi kemudian juga media pengantar komunikasi terstruktur dengan baik sehingga komunikasi pada penyerapan aspirasi menjadi terarah dan tertib.

2. Berdasarkan faktor-faktor pada penerapan komunikasi efektif pada komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai faktor penghambat komunikasi anggota DPRD terhadap masyarakat pada proses penyerapan aspirasi masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kamrianto selaku anggota DPRD Kab. Sinjai fraksi PAN mengatakan :

“...untuk faktor penghambatnya sendiri ada ketidakpuasan masyarakat dari penyerapan aspirasi sehingga ada rasa kecewa dan marah, aspirasi mereka kan tidak semua kita terima. Berdasarkan proses skala prioritas kalau ada yang lebih penting tentu kita dahulukan...” (Wawancara Kamrianto di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Wawancara diatas dapat diketahui bahwaasanya faktor penghambat pada proses penyerapan aspirasi ini yakni ketidakpuasan masyarakat

terhadap hasil aspirasi dikarenakan skala prioritas pembangunan di daerah yang diutamakan. Kemudian melakukan wawancara bersama Hasnah selaku anggota dewan fraksi PBB yang mengatakan:

“...menurut saya hambatannya pada proses aspirasi ini mengumpulkan masyarakat untuk duduk bersama berdialog bersama agak susah apa lagi ditengah pandemi covid-19 pada saat itu, kita dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan dan tidak boleh mengumpulkan masyarakat dengan skala besar. Masyarakat yang ikut pada proses dialog aspirasi ini hanya sedikit sekali padahal kami anggota DPRD ingin melihat dan mendengar seluruh keluhan masyarakat...” (Wawancara Hasnah di Kabupaten Sinjai, 25 November 2021)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya hambatan pada proses ini yakni kurangnya masyarakat yang hadir untuk melakukan dialog sehingga aspirasi yang terserap tidak terakomodir secara keseluruhan. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Sirajuddin selaku Kepala Desa Tongke-Tongke yang mengatakan :

“...ya kalau hambatannya kurangnya minat masyarakat untuk melakukan hal-hal demikian, padahal ini kepentingan dari masyarakat itu sendiri...” (Wawancara Sirajuddin di Kabupaten Sinjai, 26 November 2021)

Dari wawancara diatas diketahui bahwasannya hambatan pada proses penyerapan aspirasi yakni kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi. Dari keseluruhan wawancara berdasarkan faktor penghambat adapun yakni kurangnya partisipasi masyarakat kemudian juga ketidakpuasan hasil aspirasi dari masyarakat yang menyebabkan kekecawaan dan kemarahan.

Berdasarkan keseluruhan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerapan aspirasi masyarakat yakni berdasarkan faktor pendorong ada beberapa hal yang membuat komunikasi pada penyerapan aspirasi berjalan dengan baik yakni adanya respon masyarakat terhadap penyerapan aspirasi kemudian juga media pengantar komunikasi terstruktur dengan baik sehingga komunikasi pada penyerapan aspirasi menjadi terarah dan tertib sedangkan untuk faktor penghambat yakni kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan dialog penyerapan aspirasi masyarakat dan juga rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil dari dialog penyerapan aspirasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan efektivitas komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19 pada 5 indikator pengukur maka dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19 tetap efektif dan tetap berjalan sesuai aturan pemerintah serta tetap berada pada batasan-batasan protokol kesehatan dengan komunikasi yang baik dan dengan saling menghargai satu sama lain baik itu antara anggota DPRD kepada pemerintah maupun anggota DPRD kepada masyarakat tanpa lepas dari empati yang dimiliki oleh anggota DPRD, mampu mampu menyesuaikan situasi masyarakat berdasarkan kultur budaya yang dimiliki oleh masyarakat serta merasakan kondisi masyarakat. Anggota DPRD juga mau dan harus mendengarkan keluhan masyarakat terhadap kebutuhan dan kesulitan masyarakat ditengah pandemic Covid-19. Tentu dalam hal ini anggota dewan haecus mampu menjelaskan secara terbuka kondisi pemerintah ditengah pandemi Covid-19 yang membatasi segala ruang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan rasa kerendahan hati anggota DPRD mampu mendapatkan simpati dan bersikap baik kepada masyarakat pada pada proses penyerapan aspirasi sehingga walaupun terbatas oleh kondisi pandemi Covid-19 tidak membuat proses

komunikasi politik antara masyarakat kepada pemerintah tertutup dan tetap dilakukan sedemikian baik untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

2. Sedangkan untuk faktor pendukung dan hambatan efektivitas komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat dimasa pandemi Covid-19 yakni berdasarkan faktor pendorong ada beberapa hal yang membuat komunikasi pada penyerapan aspirasi berjalan dengan baik yakni adanya respon masyarakat terhadap penyerapan aspirasi kemudian juga media pengantar komunikasi terstruktur dengan baik sehingga komunikasi pada penyerapan aspirasi menjadi terarah dan tertib sedangkan untuk faktor penghambat yakni keterbatasan dalam mengumpulkan masyarakat dikarenakan ditengah situasi pandemi covid-19 sehingga hanya sedikit masyarakat yang hadir pada pelaksanaan penyerapan aspirasi, kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan dialog penyerapan aspirasi masyarakat dan juga rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil dari dialog penyerapan aspirasi.

B. Saran

1. Diharapkan Anggota DPRD dalam proses penyerapan aspirasi mengoptimalkan seluruh indikator komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan masyarakat jauh lebih baik.
2. Diharapkan Anggota DPRD melakukan Protokol Kesehatan yang ketat pada saat berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mengurangi dampak Covid-19 Di Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. (2015). *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Solo :PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Almutahar, Lutfi. (2016). *Pola Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Tahun 2013 Di Kecamatan Pontianak Timur*. Pontianak :Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2022
- Cangara, Hafied. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , (2013). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Goni, Michael G.H. (2019). *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019*.
- Herwin (2016). *Komunikasi Antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Dengan Konstituean Pada Daerah Pemilihan Di Kecamatan Patampanua Periode 2014-2015*. Makassar :Universitas Muhammadiyah Makassar
- Efriza & Jerry Indrawan. (2018). *Komunikasi Politik: Pemahaman Secara Teoritis dan Empris*. Malang: Intrans Publishing
- Henry Subiakto dan Rachmah Ida. (2012). *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Junaedi, Fajar. (2013). *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera
- Maulana, H. Gumelar, G. (2013). *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta :Akademia Permata
- Maulana, Agus. (2011). *Komunikasi Antar Manusia*. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group
- Mulyana, Deddy. (2013). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- , (2011). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Rosda Karya
- Mukarrom, Zaenal. (2016). *Komunikasi Politik*. Bandung: Pustaka Setia

- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya
- Mukarom, Zaenal. (2016). *Komunikasi Politik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Nurudin.(2017). *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*. Jakarta :Rajawali Pers
- Nimmo, Dan. (2005). *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Nina Maulidia Rizka, Hamdani M. Syam. (2018). *Pola Komunikasi Politik Illiza Sa'adudin Jamal Menjelang Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017 (Penelitian Terhadap Dukungan Pencalonan Dari Partai Politik)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol. 3
- Pureklolon, Thomas Tokan. (2016). *Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Rodee, dkk.(2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suranto, A.W. (2011). *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabeta
- . (2018). *Memahami Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), R & D*. Bandung :Alfabeta
- Suwarto. (2010). *Perilaku Organisas*. Jogjakarta : Universitas Atmajaya.
- Sujana, Eka. (2017). *Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang)*
- Yusuf, Muri (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenada Media Group

SUMBER LAIN :

Peraturan Perundang-undangan RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

WEBSITE / INTERNET

DPRD Kabupaten Sinjai. (2021). <http://dprd.sinjaikab.go.id> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 08.27 WITA

Satuan Tugas Covid-19 Republik Indonesia(2021). *Data Sebaran Virus Covid-19 di Indonesia*,<http://covid19.go.id>. diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 19.54 WIB.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai



Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai



Narasumber Anggota DPRD Sinjai Ibu Hasna.



Narasumber Anggota DPRD Sinjai, Pak Ardiansyah Haris (Kiri) Haris dan Pak Kamrianto (Kanan).



Narasumber Kepala Desa Patalassang.



Narasumber Data Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.



Narasumber Warga Desa Patalassang.



Narasumber Warga Desa Sukamaju.



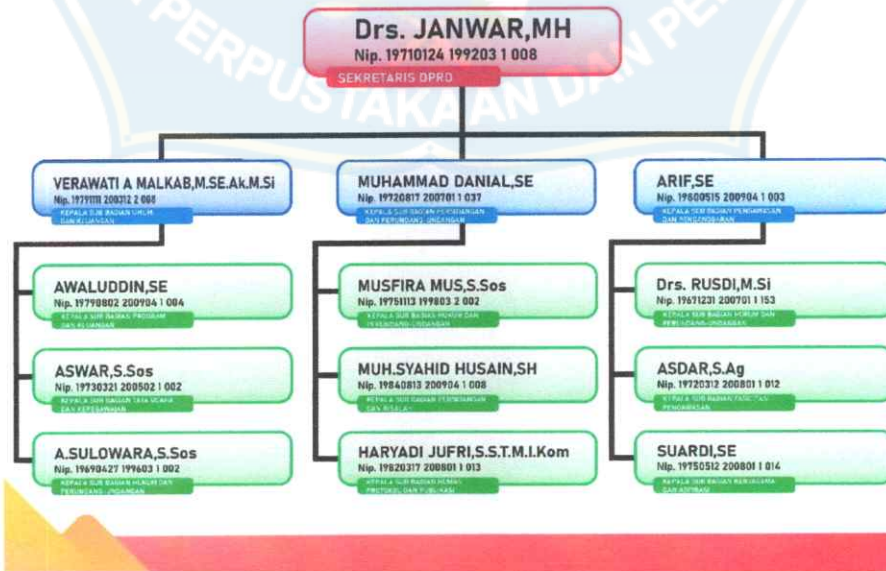
Narasumber Kepala Desa Tongke-Tongke.



Narasumber Warga Desa Tongke-Tongke



Narasumber Kepala Desa Sukamaju.



Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.

PERSURATAN IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 4789/05/C.4-VIII/X/40/2021

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

09 Rabiul awal 1443 H

15 October 2021 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 25/PRODI IK/FSP/VIII/2021 tanggal 14 Oktober 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AIDIL REZKIAWAN

No. Stambuk : 10565 1100616

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Efektivitas Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Anggota Dewan Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Priode 2019-2024)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober 2021 s/d 18 Desember 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 22369/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kab. Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4789/05/C.4-VIII/X/40/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AIDIL REZKIAWAN**
Nomor Pokok : 105651100616
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EFEKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM MENYERAP ASPIRASI RAKYAT DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Anggota Dewan Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Periode 2019 - 2024) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 18 Oktober s/d 18 Desember 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 18-10-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Tanassang Kel. Alehanuue ☎ 0482 – 2429008 Fax (0482) 2429008 ✉ 92611

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 02.041/ Set.DPRD/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Janwar, M.H
Pangkat / Golongan : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Sinjai

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama : Aidil Rezkiawan
2. Jenis Kelamin : 105651100616
3. Tempat / Tanggal Lahir : 31 Januari 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 25 Makassar

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian selama 45 Hari Kerja terhitung Tanggal 18 Oktober s/d 18 Desember 2021 dengan judul : “ **EFEKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM MENYERAP ASPIRASI RAKYAT DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Anggota Dewan Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Periode 2019-2024)**”.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD KAB. SINJAI

Drs. Janwar, M.H
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
Nip. 19710124 199203 1 00



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Aidil Rezkiawan

NIM : 105651100616

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Juli 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinab, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Aidil Rezkiawan 105651100616

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | sramarpahlawan.blogspot.com
Internet Source | 6% |
| 2 | fr.slideshare.net
Internet Source | 3% |
| 3 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper | 2% |

Exclude quotes

Or

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB II Aidil Rezkiawan 105651100616

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ml.scribd.com	Internet Source	8%
2	docplayer.info	Internet Source	4%
3	core.ac.uk	Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id	Internet Source	2%
5	dehaelaftid.blogspot.com	Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Andalas	Student Paper	2%
7	digilib.uinsby.ac.id	Internet Source	2%
8	www.coursehero.com	Internet Source	2%
9	digilibadmin.unismuh.ac.id	Internet Source	2%

BAB III Aidil Rezkiawan 105651100616

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

1	journal.unpad.ac.id Internet Source	4%
2	epub.imandiri.id Internet Source	3%
3	jsp.fisip-unmul.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

BAB IV Aidil Rezkiawan 105651100616

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.sinjai.go.id Internet Source	3%
2	alhonk.blogspot.com Internet Source	2%
3	nyols.blogspot.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

BAB V Aidil Rezkiawan 105651100616

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

25%

Exclude bibliography

On



BIODATA PENELITI



Aidil Rezkiawan, lahir di Kabupaten Sinjai pada tanggal 31 Januari 1998 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Agus Salim dan Ibu Helfidar, memiliki adik perempuan bernama Ainun Anugrawati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD NEGERI 160 Boropao tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 2 Sinjai Timur dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Darussalam Patalassang yang lulus pada tahun 2016. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menyelesaikan pendidikan di tahun 2022.

Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi sejak dibangku sekolah hingga di perguruan tinggi. Peneliti terlibat secara aktif di beberapa organisasi intra maupun ekstra kampus yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi (HUMANIKOM), Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Simpul Pena Sulawesi – Selatan.

Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha, peneliti dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Komunikasi. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dapil II DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum 2019)”.